

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abas, M. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis: Pengetahuan Dasar-Dasar Hukum Bisnis di Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andasasmita, K. (1986). *Hukum Apartemen: Rumah Susun*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Budiono, H. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Busro, A. (2012). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fuady, M. (2015). *Hukum Kontrak Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.S, S. (2017). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-Segi Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harsono, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hermit, H. (2009). *Komentar Atas Undang-Undang Rumah Susun*. Bandung : Mandar Maju.
- HS, S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Iskandar, M. (2019). *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Judohusodo, S. (1991). *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, R. (2015). *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kuahaty, S. S. (2023). *Hukum Perdata*. Bandung: Widiana.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Patrik, P. (1986). *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Angkasa.
- Rahim. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*. Makassar: Humanities Genius.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Santoso, U. (2017). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2014). *Wanprestasi: Menurut KUH Perdat, Dokrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Shofie, Y. (1999). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sinaga, B. (2005). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Tinggi.
- Sjachran, R. (2021). *Hukum Properti: Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Inden*. Jakarta: Kencana.
- Sjachran, R. (2021). *Karakteristik Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Inden*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. (1992). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Subketi, R. (1975). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Suryono, L. J. (2014). *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Syahrani, R. (2013). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Wigyosubroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM HUMA.
- Zainuddin, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

PUBLIKASI ILMIAH/JURNAL

- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*.
- Alzanzami, J. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukum Dalam Hal Terjadi Wanprestasi. *Media of Law and Sharia*.
- Ayu, K. (2023). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Susun Melalui Pemesanan . *Universitas Udayana*.
- Budhayati, C. T. (2009). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Widya Sari*.
- Caesar, V. (2023). Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun Yang Dibuat oleh Notaris. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.
- Gunawan, J. (2021). Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi. *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*.
- Isnaeni, M. (2016). Kebatalan, Batal, dan Syarat Batal, dalam Perjanjian Timbal Balik. *Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat*.
- Krisno, A. A. (2015). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah. *Jurnal Hukum Kerta Semaya*.
- Kurniawan, N. S. (2013). Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan. *Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana*.
- Panggabean, H. P. (1992). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandighegen) sebagai Alasan Baru untuk Pembatalan Perjanjian: Berbagai Perkembangannya Hukum di Belanda. *Kanisius*.
- Purba, P. (2019). Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunitas Yustisia*.

- Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. *Institut Bankir Indonesia*.
- Susanto, I. (1999). Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Fakultas Universitas Diponegoro*.
- Suwandono, A. (2015). Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen di Sektor Barang dan Jasa Keuangan. *Modul 01*.

INTERNET

- Bahfein, S. (2020). Tren Pengakuan Properti Naik, YLKI Desak Peemerintah Bikin Organisasi Perlindungan Konsumen. Retrieved from <https://www.kompas.co/properti/read/2023/01/20/200000821/tren-pengaduan-properti-naik-yлки-desak-pemerintah-bikin-organisasi> Pada 20 Januari
- Data retrieved from dataindonesia.id Badan Pusat Statistik: Jumlah Penduduk (2022). Presentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% ke bawah) menurut Provinsi (Persen) 2017-2019.
- Fandy. (2024). PPJB Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/ppjb/> Pada 16 Januari
- Lukita. Pasar Apartemen Memasuki Keseimbangan Baru. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/17/pasar-apartemen-memasuki-keseimbangan-baru> Pada 19 Januari

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Mr. Subekti dan R. Tjitrosuidio. Jakarta: Pradnya Paramita. 1960.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624)

Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777)

Indonesia, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan No. 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr